

MENGUAK KEKUATAN DAN PROBLEMATIKA AGENCY THEORY DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

Andi Nurwanah

Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia
Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Makassar
n_wanah@yahoo.com

***Abstract:** Agency theory evolved into the issue of the manager after the inclusion of the results of the control or form of behavior. The manager understood as agents who pursue personal interests against the interests of the owners or shareholders of the investment company which would create residual residual loss due to personal interest manager. Agency problem not only occurs between managers and shareholders, but can also occur between managers and creditors, among the shareholders with creditors. Agency problem actually raises agency costs. At the most general level, agency costs are the dollar equivalent of the welfare decline suffered by the owner. This behavior resulted managers understand the nature of the mandate as to be loyal to the directors. However, if viewed from the nature of the trust that comes from God, both the manager and the board of directors has acted not according to the teachings of trust. Mandate is an act that violates moving towards treason, and such things is prohibited and restrictions on religion is a "sin".*

***Abstrak:** Agency theory berkembang menjadi isu manajer setelah adanya penyertaan tentang pengendalian hasil atau bentuk perilaku. Manajer dipahami sebagai agen yang mengejar kepentingan pribadi terhadap kepentingan investasi pemilik atau pemegang saham perusahaan yang kemudian menciptakan sisa kerugian residual dikarenakan kepentingan pribadi manajer Masalah keagenan bukan hanya terjadi antara manajer dengan pemegang saham, tetapi dapat juga terjadi antara manajer dengan kreditor, antara pemegang saham dengan kreditor. Masalah keagenan sebenarnya menimbulkan biaya keagenan. Pada tingkat yang paling umum, biaya keagenan adalah setara dolar dari penurunan kesejahteraan yang dialami pemilik. Perilaku ini mengakibatkan para manajer memahami amanah sebagai sifat yang harus loyal pada direksi. Namun demikian jika dilihat dari hakekat amanah itu datangnya dari Allah, baik manajer maupun direksi telah melakukan tindakan yang tidak sesuai ajaran amanah. Melanggar amanah merupakan tindakan yang menuju kearah berkhianat, dan hal yang demikian ini merupakan perbuatan yang dilarang dan larangan dalam agama adalah "dosa".*

Kata Kunci: kekuatan, masalah *agency theory*, khianat, amanah

PENDAHULUAN

Pihak-pihak yang terhimpun dalam suatu organisasi yang berusaha untuk mengkolaborasi semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting karena proses pencapaian tujuan ini dilakukan secara efektif dan efisien. Ketepatan untuk pencapaian tujuan diperlukan strategi perusahaan dan melibatkan pihak dalam organisasi.

Dalam teori keagenan (*agency theory*) pemberian suatu produk berupa barang dan jasa, diperlukan hubungan agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang diterima oleh *principal* terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetris informasi (*information asymmetric*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba.

Sebagai agen manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Informasi yang terkait dengan perusahaan baik internal maupun prospek perusahaan di masa yang akan datang lebih banyak diketahui manajer sebagai pengelola dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer memberikan informasi kepada pemilik mengenai kondisi perusahaan. Informasi tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Informasi yang tidak seimbang memicu munculnya asimetri informasi (*information asymmetry*).

Agency theory berkembang menjadi isu manajer setelah adanya penyertaan tentang pengendalian hasil atau bentuk perilaku. Manajer dipahami sebagai agen yang mengejar kepentingan pribadi terhadap kepentingan investasi pemilik atau pemegang saham perusahaan yang kemudian menciptakan sisa kerugian residual dikarenakan kepentingan pribadi manajer (Jansen dan Mackling, 1976).

Agency theory mengimplikasikan adanya informasi asimetris antara manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai prinsipal. Informasi asimetris muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa mendatang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Oleh karena itu prinsipal perlu menciptakan suatu sistem yang dapat memonitor perilaku agen supaya bertindak sesuai dengan harapannya. Aktivitas ini meliputi biaya untuk penciptaan standar, biaya monitoring agen, penciptaan sistem informasi akuntansi dan lain-lain. Aktivitas ini menimbulkan biaya yang disebut sebagai *agency cost*.

Masalah keagenan bukan hanya terjadi antara manajer dengan pemegang saham, tetapi dapat juga terjadi antara manajer dengan kreditor, antara pemegang

saham dengan kreditor. Masalah keagenan sebenarnya menimbulkan biaya keagenan. Pada tingkat yang paling umum, biaya keagenan adalah setara dolar dari penurunan kesejahteraan yang dialami pemilik. (Godfrey, 2010).

Agency theory terfokus pada dua individu yaitu pihak prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pihak memberikan mandate kepada pihak lain yang disebut agen. Agen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pihak pemilik (*principal*) harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan. Dilain pihak prinsipal sebagai pihak pemberi amanah akan memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik financial maupun nonfinansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan principal untuk member insentif kepada agen.

Mengingat pertentangan yang semakin tajam justru akan menyebabkan konflik disfungsi yang berkepanjangan. Menurut Scapen (1987) bahwa masing-masing pihak akan berusaha sekeras mungkin untuk dapat memaksimalkan utilitas. Disamping itu, utilitas tersebut akan menghadapi kendala (*constrain*), sehingga baik prinsipal tidak akan mencapai tingkat utilitas maksimum seperti yang diharapkan. Sehingga, akan terjadi suatu keadaan yang disebut pareto optimal. Pareto optimal adalah situasi yang terjadi apabila aktivitas realokasi produksi atau konsumsi tidak memungkinkan semua pihak menjadi lebih baik tanpa membuat suatu pihak menjadi lebih lemah. Dengan tercapainya pareto optimal, maka optimalisasi utilitas tidak hanya dilihat dari satu pihak saja, namun dari berbagai pihak.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut meliputi *moral hazard* yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja, dan *adverse selection* yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. *Agency theory* dalam perspektif islam bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Secara khusus informasi akuntansi yang disajikan kepada para investor dan kreditor mengharapka adanya return yang menguntungkan atas apa yang telah mereka investasikan. Sebagai pemasok modal, investor dan kreditor menghendaki adanya informasi seberapa jauh manajemen (agen) telah mengelola sumber daya dengan baik.

TINJAUAN TEORETIS DAN PEMBAHASAN

Agency Theory

Anthony dan Govindarajan (2007) mengemukakan teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara pemegang saham dan manajer. Prinsip utama teori ini adalah hubungan kerja antara pihak yang member wewenang yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerjasama. Teori keagenan yang berasumsi bahwa tiap individu termotivasi dengan kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik

kepentingan. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Aliran dalam teori keagenan ada dua (Jensen dan Meckling, 1976) yaitu: 1) *positive theory of Agency* yaitu untuk mengidentifikasi ketika pemegang saham dan manajer mengalami konflik dan mekanisme pemerintah yang membatasi self saving dalam diri manajer; 2) *prinsipal agent literature* yaitu fokus pada penekanan hubungan pemegang saham dan manajer terhadap kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya. *Agency theory* menguraikan hubungan antara pihak prinsipal dan *agen*, dimana prinsipal adalah pihak yang memberikan mandate kepada agen. Prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen dimana hak dan kewajiban kedua belah pihak diuraikan dalam suatu perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Model "manusia" yang mendasari teori agensi adalah bahwa aktor rasional, merupakan individu yang memaksimalkan utilitasnya (Jensen & Meckling, 1976). Keduanya agen dan prinsipal dalam teori agensi bertujuan mendapatkan sebanyak mungkin utilitas dengan pengeluaran terakhir.

Agency theory mengarahkan pada analisis pengendalian manajemen terhadap berbagai bentuk hubungan kontraktual antara pemilik (*principals*) dengan perwakilan (*agent*) yang ditunjuk *principals* untuk mewakilinya pada transaksi (Jansen dan Mackling 1976). Dan melihat penyalagunaan kebijakan yang sudah didelegasikan *principal* dan *agen* tetapi karena kecurangan yang di buat *agen* dapat merusak kepentingan *principal*

Dalam *agency theory* dikenal adanya kontrak kerja, yang akan mengatur proporsi utilitas masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan (*return*) maupun risiko (*risk*) yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Selain itu, kontrak kerja yang optimal adalah kontrak yang seimbang antara prinsipal dan agen yang secara sistematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian imbalan khusus oleh prinsipal kepada agen. Kajian mengenai bagaimana membuat suatu kontrak kerja yang optimal merupakan kunci bagi terwujudnya suatu hubungan prinsipal-agen yang ideal.

Agency theory menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: a) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), b) manusia memiliki rasional terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded-rationality*), dan c) manusia selalu tak suka risiko (*risk-averse*) (Eisenhardt, 1989). Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) mengikat orang lain (*agen*) untuk melakukan layanan atas kehendak mereka, dengan mendelegasikan kekuasaan beberapa pengambilan keputusan kepada agen.

Biaya Keagenan

Para pelaku usaha akan berupaya mengekang biaya yang tidak perlu (*residual loss*) dengan mengawasi dan memberi sanksi terhadap para manajer melalui pemasangan *system control* dan insentif. *System control* mempunyai kekuatan penuh para dewan direktur yang terbentuk secara mandiri, terbentuk dari pihak-

pihak luar yang mengawasi para eksekutif atas nama pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983)

Gul (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. Lain halnya dengan yang ditemukan Chiang dan Ko (2009) menunjukkan bahwa biaya keagenan tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, kepemilikan institusional menginginkan peningkatan nilai perusahaan agar tingkat kemakmuran pemilik meningkat dan keceradaan kepemilik institusional ini diharapkan dapat mengurangi biaya keagenan.

Biaya keagenan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memonitor perilaku manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Wu dan Tu (2007) telah memverifikasi faktor penentu biaya keagenan diantaranya karena gender top manajemen (Jarkus, 2011). Struktur kepemilikan (Fatma, 2011), Financial leverage (Khan, 2012), struktur permodalan (Li dan Cui, 2003), dan kompensasi manajemen (Zhang, 2009).

Jensen dan Meckling (1976) megemukakan adanya *agency problem* menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*): 1) *The monitoring expenditures by the principle*. Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen termasuk juga untuk mengendalikan (*control*), perilaku agen melalui *budget restriction* dan *compensation policies*; 2) *The bonding expenditures by the agent*. *The bonding cost* dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan principal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan; 3) *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship*

Agency Theory dalam Perspektif Islam

Agency theory berasal dari asumsi bahwa individu memaksimalkan tingkat kepuasan yang diharapkan melalui kemampuan sumber dayanya yang memadai dan inovasinya dalam bertindak sehingga pengungkapan yang dikeluarkan berdasarkan acuan pada *agency theory* merupakan sebagian dari manfaat yang diharapkan oleh individu dengan suatu tindakan tertentu. *Agency theory* memberikan peranan penting akuntansi dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian atau keputusan, yang mana seorang agen melaporkan kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian yang muncul dalam periode yang telah lalu. *Agency theory* mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) Untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana suatu keputusan harus diambil (*The Belief Revision Role*); 2) Untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil untuk memudahkan pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan persetujuan dalam kontrak kerja (*The Performance Evaluation Role*).

Pertentangan dan tarik menarik kepentingan anatar prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *agency theory* dikenal sebagai informasi asimetris yang tidak sepadan atau tidakimbang. Yaitu suatu kondisi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Seharusnya prinsipal memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam

mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata ukuran-ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya transparan sehingga informasi yang diperoleh prinsipal tetap tidak dapat menjelaskan hubungan antara keberhasilan yang telah dicapai dengan usaha yang telah dilakukan agen. Kondisi informasi asimetris ini dapat menimbulkan permasalahan. *Pertama, moral hazard* yaitu bilamana agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. *Kedua, adverse selection* yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 282. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. "Substansi" dari perintah ini adalah: (1) praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi dalam konteks ini, sekali lagi, berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Teori Akuntansi Syariah memberikan *guidance* tentang bagaimana seharusnya Akuntansi Syariah itu dipraktikkan. Dengan bingkai *faith* (keimanan), teori (*knowledge*) dan praktik Akuntansi Syariah (*action*) akan mampu menstimulasi terciptanya realitas ekonomi-bisnis yang bertauhid. Realitas ini adalah realitas yang di dalamnya sarat dengan jaringan kerja kuasa ilahi yang akan menggiring manusia untuk melakukan tindakan ekonomi-bisnis yang sesuai dengan Sunnatullah (Triyuwono, 1986).

Dalam konteks lingkaran keimanan tadi, maka secara filosofis teori Akuntansi Syariah (sebagai salah satu ilmu sosial profetik) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Triyuwono 1995; 2000a; 2000b):

1. Humanis, memberikan suatu pengertian bahwa teori Akuntansi Syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini berarti teori Akuntansi Syariah tidak bersifat a historis (sesuatu yang asing), tetapi bersifat historis, membumi, dibangun berdasarkan budaya manusia itu sendiri.
2. Emansipatoris, mempunyai pengertian bahwa teori Akuntansi Syariah mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Pembebasan dari ikatan-ikatan semu yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuasaan semu (*pseudo power*), dan pembebasan dari ideologi semu. Dengan pembebasan ini diharapkan bahwa teori Akuntansi Syariah mampu melakukan perubahan pemikiran yang sempit dan parsial menuju pemikiran yang luas, holistik, dan tercerahkan.
3. Transendental, mempunyai makna bahwa teori Akuntansi Syariah melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Bahkan melintas batas dunia materi

(ekonomi). Dengan prinsip filosofis ini teori Akuntansi Syariah dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi disiplin ilmu lainnya (selain ilmu ekonomi). Aspek transendental ini sebetulnya tidak terbatas pada disiplin ilmu, tetapi juga menyangkut aspek ontologi, yaitu tidak terbatas pada objek yang bersifat materi (ekonomi), tetapi juga aspek non-materi (mental-spiritual). Demikian juga pada aspek epistemologinya, yaitu dengan melakukan kombinasi dari berbagai pendekatan. Sehingga dengan cara semacam ini, teori Akuntansi Syariah benar-benar akan bersifat emansipatoris.

4. Teleologikal, memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan, yaitu *falah* (kemenangan). *Falah* di sini dapat diartikan keberhasilan manusia kembali ke Sang Pencipta dengan jiwa yang tenang dan suci (*mutmainnah*).

Rasionalitas Agency Theory

Perilaku manajer sebagai agen untuk bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan pihak lain. Adanya Asimetri informasi dan *self serving behavior* pada manajer memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Adanya kondisi ini menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya kepada *principal*.

Agency theory sama sekali tidak obyektif dan netral tapi sebaliknya ia sarat dengan nilai kapitalistik yang dalam faktanya sangat eksploitatif. *Agency theory* secara samar memiliki kemampuan untuk merasionalisasikan, menormalisasikan dan melegitimasi berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mengendalikan buruh yang seolah-olah kaum buruh memperoleh banyak manfaat dari sistem yang sesungguhnya sangat eksploitatif (Chawastiak, 1999).

Model tersebut dilakukan dengan semua tindakan manusia dengan cara yang "rasional". Pada kenyataannya, rasionalitas meniadakan instrumen "rasa" dan "intuisi" yang ada dalam diri manusia, serta meniadakan mutual *assistance* dan *reciprocal respect* yang hidup dalam masyarakat. Dan mengidentitaskan dirinya pada logika kuantitatif dan kalkulatif yang terpisah dari unsur-unsur "irrasional" (atau *superrasional*). Perilaku manusia yang hakiki merupakan Sikap yang tidak memberikan tempat pada *trust* dan *fairness*. Rasionalitas *agency theory* tidak lebih dari rasionalitas utilitarianisme yang implikasinya memang dapat memarginalkan sifat-sifat "feminin" manusia (seperti: rasa, intuisi, spiritual, saling membantu, saling menghormati, saling percaya, jujur, dan lain-lainnya).

Informasi akuntansi disajikan pada dua pihak, yaitu investor dan kreditor, di mana keduanya merupakan pihak yang memasok "modal" (sebagai "pemilik modal") pada perusahaan dan mereka mengharapkan adanya *return* yang menguntungkan atas apa yang telah mereka investasikan. Para pemasok (atau

sebagai *principal*), investor dan kreditor menghendaki adanya informasi tentang seberapa jauh manajemen (agen) telah mengelola sumber daya tadi dengan baik.

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara *principal* dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalance khusus yang memuaskan dari *principal* ke agen. Inti dari *agency theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *principal* dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997).

Aplikasi *agency theory* dapat dilihat juga dalam konteks penyusunan anggaran pada sektor publik. Usulan yang diajukan eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif yaitu eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agencynya baik dari segi *financial* maupun *non financial*. Sementara Keefer & Khemani (2003), Mauro (1998) dan Von Hogen secara *implicit* menyatakan bahwa anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi *self interest*nya. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang dipergunakan untuk menyusun anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*directionary power*) yang dimiliki oleh legislatif.

PENUTUP

Agency theory timbul sebagai akibat adanya dua pihak atau dua individu di dalam organisasi yang bertentangan kepentingan, dimana kedua individu tersebut memiliki tujuan untuk memaksimalkan tingkat kepuasannya masing-masing. Aplikasi *agency theory* kontrak kerja merupakan suatu filosofi dalam memahami peranan dan kedudukan di antara agen dan prinsipal. Kontrak kerja yang ideal adalah kontrak kerja yang mampu mengoptimalkan utilitas masing-masing pihak dengan tujuan tercapainya *pareto* yang optimal.

Praktik akuntansi dan praktik akuntansi kreatif perusahaan merupakan budaya kerja perusahaan yang sangat berpengaruh. Dalam tinjauan amanah praktik akuntansi kreatif dalam konteks *agency theory* termasuk dalam kelompok praktik yang bertujuan untuk mementingkan diri sendiri, baik oleh prinsipal maupun agen. Perilaku ini mengakibatkan para manajer memahami amanah sebagai sifat yang harus loyal pada direksi. Namun demikian jika dilihat dari hakekat amanah itu datangnya dari Allah, baik manajer maupun direksi telah melakukan tindakan yang tidak sesuai ajaran amanah. Melanggar amanah merupakan tindakan yang menuju kearah berkhianat, dan hal yang demikian ini merupakan perbuatan yang dilarang dan larangan dalam agama adalah "dosa".

Hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian yang tak terpisahkan. Eksekutif merupakan agen

bagi legislatif dan publik (*dual accountability*) dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan public tidak terbela seluruhnya oleh karena adanya perilaku *oportunistik (moral hazard)* legislatif. Di sisi lain eksekutif sebagai agen cenderung menjadi budget maximize karena berperilaku oportunistik (*adverse selection dan moral hazard*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, N. dan Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Edisi kesebelas. Salemba Empat, Jakarta.
- Chwastiak, Michele. 1999. *Deconstructing The Prinsipal Agent Model: a View From The Bottom Critical Perspective on Accounting*, 10(4): 425- 441.
- Chiang., Yi Chein., Ko dan Chun Lem. 2009. An Empirical Study of Equity Agency Cost and Internationalization. Evidence From Taiwanese firms. *Research in International Business and finance*, 23.
- Einsenhardt, Kathleen M. 1989. Agency theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1): 57-74
- Godfrey, J., Jayne Maree. 2010. *Accounting Theory* . 7th edition. John Wiley.
- Gul Sajid, Muhammad, Razzaq Nasir, Afzal Farman. 2012. *Agency Cost Corporate Governance and Ownership Structure*, 3(9).
- Fama Eugene F dan Michael C Jensen. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, XXVI June: 1-32.
- Jurkus, A.F., Park, Jung Chul, Woodard Lorraine S. 2011. Women in Top Management and Agency Cost. *Journal of Business Research*, 64.
- Jensen, Michael C. dan Meckling, William, H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3: 82-137.
- Keefer, Philip dan Stuti Khemani. 2003. *The Political Economy of Public Expenditures Background Paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Khan, Asma., Kaleem Ahmad., Nasir, Mian Sajid. 2012. Impact of Financial Leverage On Agency Cost of Free Cashflow: Evidence from the Manufacturing Sector of Pakistan. *Journal Basic and Applied Scientific Research*, 2(7).
- Li, Hongxia., Cui, Liming. 2003. Empirical Study of Capital Structure on Agency Costs in Chinese Listed Firms. *Nature and Science*, 1(10): 12-20.
- Mauro, Paolo. 1998. Corruption: Causes, Consequences and Agenda for further Research. *Finance & Development*, March:11-14.
- Scott, Helen., Zhang, Hao., Keasey Kevin. 2002. *The Link Between Dividend Policy and Institutional Ownership*, 8(2).
- Triuwono, Iwan. 1997. Akuntansi Syariah dan Koperasi; Mencari bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 1(1).
- Wu, Jianfeng, Tu Rungting. 2007. CEO Stock Option Pay and R&D Spending A Behavioral Agency Explanation. *Journal of Business Research*, 60(5).

Nurwanah, Mengungkap Kekuatan dan Problematika Agency Theory...

Zhang, Y. 2009. Are Debt and Incentive Compensation Substitute in Controlling the Free Cashflow Agency Problem? *Financial Management*, 38(3).